



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

*Tahun 2024*

**Dinas Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Padang Pariaman**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang mencakup akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Tahun 2021- 2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKJIP 2024 ini merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, serta akuntabilitas kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pariaman, 27 Januari 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Dra.ELFI DELITA,M.Farm,Apt  
NIP. 196608021993032005

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.....	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issud) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.....	3
C. Sistematika Pelaporan.....	4
<b>BAB II. PERENCANAAN KERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	6
B. Rencana Kinerja tahunan (RKT) tahun 2024.....	8
C. Perjanjian Kinerja.....	8
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KENERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	10
B. Realisasi Anggaran.....	25
C. Penghargaan.....	34
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	40
B. Langkah Kedepan .....	40

**P**emerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan transparansi tata kelola pemerintah yang baik, upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah adalah berupa penyampaian Lapiran Kinerja.

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman**

##### **1. Kelembagaan**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman beralamat di Jl. Zaini No. 07 Kuraitaji Pariaman, berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah , maka Badan Kependudukan dan Keluarga daerah berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 tahun 2016, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dibentuk melalui Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pembinaan, pengawasan, dan penendalian penyusunan kebijakan strategis dinas.
  - b. Perumusan kebijakan umum bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
  - d. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - f. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
  - h. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan / atau
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Ringkasan Personil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman**

Dalam pelaksanaan tugas urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman mempunyai susunan personil sebagai Berikut :

**Tabel : 1.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Kualifikasi Pendidikan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024**

No	Jumlah Pegawai Menurut				Ket
	Golongan		Pendidikan		
1	I	0	SD	0	
2	II	0	SMP	0	
3	II	3	SLTA	3	
4	II	7	D-3	7	
5	III	0	SLTA	0	
6	III	0	D-3	0	
7	III	10	S.1	10	
8	III	2	S.2	2	
9	IV	1	S.1	1	
10	IV	4	S.2	4	
Jumlah		27		27	

#### **B. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman**

Berdasarkan tugas pokok yang diemban, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam rangka menyelenggaraan urusan wajib pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis diantaranya :

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate ) yang harus diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk yang seimbang di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga perlunya dilakukan KIE/promosi program Bangga Kencana
4. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain: masih

lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders, masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK, pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB.

5. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB antara lain; angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, Masih rendahnya keinginan bagi Pasangan Usia Subur untuk ber KB padahal sdh tidak ingin memiliki anak lagi, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, Masih rendahnya kesertaan ber-KB pria.
6. Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).
7. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain; Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, masih banyaknya perkawinan usia muda, terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR), Tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi, Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah, cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

### C. Sistematika Pelaporan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menguraikan Tugas Pokok dan Fungsi, Ringkasan Personil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, dan Permasalahan Utama (STRATEGIC ISSUED) dan Sistematika Pelaporan.

## Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

### A. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menyajikan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun;
- 8) Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

### Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

**D**inas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Implementasi RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 merupakan tahun ke empat dari periode Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Target-target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut ini dapat menjelaskan ringkasan mengenai perencanaan kinerja dan penjelasan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana tahun 2024:

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Selanjutnya Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Kebijakan, dan Program serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan Kegiatan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun waktu tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman periode 2021-2026 maka visi Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

**“ PADANG PARIAMAN BERJAYA “**

Jadi visi tersebut merupakan pandangan kedepan yang bersifat menantang dan disesuaikan dengan kewenangan yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, sehingga diharapkan visi lebih realistis dalam arti dapat dicapai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

## 2. MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman mengemban misi 5 dan 6 , Misi 5 Yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Aspiratif Dan Trasparan,** dengan Tujuan Biokrasi yang bersih dan akuntabel dan sasaran Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja pelayanan DPPKB,** sedangkan misi ke 6 Yaitu **“Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat”,** dengan tujuan RPJMD nya adalah **“Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal”** sedangkan Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah **” Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk”**. “dengan indikator tujuan “laju pertumbuhan penduduk”.

Sedangkan sasaran strategisnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

## 3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2024 (RPJMD 2021-2026)

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD 2021-20226**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Dasar Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Kearifan Lokal Melalui	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk	Angka KelahiranTotal (Total Fertility Rate/TFR)

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Pemberdayaan Masyarakat				
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Professional, Aspiratif Dan Transparan	Biokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai LPPD  Opini WTP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh 2 Sasaran Strategis dengan 2 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Pengendalian Pendudukan dan keluarga Berencana Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1.	Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,0
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		W	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
10/01/24		10/01/24		10/01/24	

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam Laporan Kinerja, berikut ditampilkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,0
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A

**D**inas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2024. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### A. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpestasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan Pengukuran dengan Scala Ordinal yaitu:

Skala Ordinal (%)	Predikat/Kategori
'> 100	Sangat Berhasil
90 < s.d ≤100	Berhasil
'<80 s.d ≤ 90	Cukup Berhasil
'< 70 s.d ≤ 80	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Utama yang menjadi indikator kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Interpretasi
1.	Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,0	2,26	Cukup Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A	A	Sangat Berhasil

Berikut ini diuraikan analisa dari capaian indikator kinerja tahun 2024 :

**SASARAN 1. Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk**



Dalam rangka meningkatkan implementasi pembangunan pengendalian penduduk yang merupakan salah satu indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, dimana yang menjadi indikatornya adalah Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR), Maka untuk mencapai sasaran tersebut telah berbagai upaya yang dilakukan selama tahun 2024. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai kegiatan, sebagai ukuran keberhasilan indikator yang ditetapkan. Analisa capaian indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) adalah sebagai berikut:

**1. Capaian Kinerja Indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) Tahun 2024**

**Tabel: 3.2**

**Capaian Kinerja indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024				Interpretasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>					
1.	Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Angka	2,0	2,26	87	Cukup Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas maka capaian indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) Kabupaten Padang Pariaman lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 2,26 %. Semakin menurun angka TFR berarti semakin berhasil upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menekan angka kelahiran. TFR merupakan angka standar capaian ideal bagi

seluruh negara yang disebut dengan istilah penduduk tumbuh seimbang, TFR yang berada dibawah angka 2,1 maka penduduk cenderung akan mengalami penurunan jumlah, namun jika TFR lebih dari 2,1 maka akan terjadi pertumbuhan penduduk. Capaian kinerja indikator persentase Total Fertility Rate ini bisa diinterpretasi dengan kategori Cukup Berhasil (87%).

Target belum tercapai semaksimal mungkin untuk itu perlu peningkatan kesertaan ber KB dan PUS melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB serta meningkatkan kerjasama dengan mitra/organisasi terkait dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB. Disamping itu telah dilakukan Upaya-upaya untuk pencapaian indikator ini adanya peningkatan penggunaan alat kontrasepsi seperti IUD, Implant, pil, kondom, suntik dan telah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi KB, bertambahnya PUS yang ber-KB, pembinaan pada kelompok remaja serta pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan dengan peningkatan pembinaan pada kelompok Bina Keluarga, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.

## 2. Capaian Kinerja indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023

**Tabel : 3.3**  
**Capaian Kinerja indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2023	Tahun 2024			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1	Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Angka	1,89	2,0	2,26	87	Cukup Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman capaiannya lebih tinggi dari tahun 2024 yaitu 2,26 sedangkan tahun 2023 sebesar 1,89.

3. Capaian Kinerja indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) tahun 2024 dibandingkan dengan target Jangka Menengah

Tabel: 3.4  
 Capaian Kinerja indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) tahun 2024 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah				Realisasi Jangka Menengah			Realisasi 2024	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Angka	2,38	2,34	2,1	2,0	2,28	1,93	1,89	2,26	Cukup Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, terjadinya perubahan dari tahun ke tahun, dari tahun 2021-2023 terjadi penurunan sedangkan dari tahun 2023-2024 terjadi kenaikan. Gambar pencapaian indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.1

Capaian indikator Presentase Total Fertility Rate Tahun 2021-2024



4. Capaian Kinerja indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) tahun 2024 dibandingkan dengan Target Nasional

Tabel : 3.5  
Capaian Kinerja indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) tahun 2023 dibandingkan dengan target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Nasional	Realisasi 2023	Interpesta si
1	2	3	4	5	6	8
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>				
1	Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Angka	2,11%	2,26%	Cukup Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Presentase Total Fertility Rate tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan target nasional, pencapaiannya lebih tinggi dari target nasional yaitu 2,26 dan target nasional 2,11%.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ketersediaan alat-alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan, adanya peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), adanya dukungan Petugas Lapangan KB, Meningkatnya akses layanan kontrasepsi, Adanya pembinaan terhadap anak-anak remaja melalui pertemuan kelompok PIK-R baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat atau luar sekolah, pembinaan remaja juga dilakukan melalui pemilihan duta genre, dimana anak-anak remaja di bekal tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, penyakit-penyakit seksual seperti HIV-Aids, narkoba dan lain-lain. Disamping pembinaan pada kelompok remaja juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, dan dengan peningkatan pembinaan pada kelompok Bina Keluarga, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.

Permasalahan / Hambatan:

1. Belum Maksimalnya Pemberian Advokasi dan KIE Kepada Masyarakat dan Masyarakat masih menganggap bahwa program tersebut bertentangan dengan agama, adat dan budaya.
2. Masyarakat masih ada ada yang belum memahami program kencana dengan baik karena beranggapan bahwa program ini membatasi jumlah anak.
3. Ketersediaan Stok Alat dan Obat kontrasepsi dari provinsi tidak mencukupi sehingga menghambat pendistribusian Alokasi.

4. Keikutsertaan berbagai lintas sektor di wilayah Kampung KB masih Kurang dalam mendukung kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh KB, Pokja Kampung KB, dan Kader dan Program Kampung Kb masih belum menjadi Prioritas Utama di beberapa wilayah.
5. Kurangnya antusias Masyarakat pada pertemuan Penyuluhan dan Lini lapangan.

Solusi/ Strategis Pemecahan Masalah:

1. Merencanakan, Menganggaran dan melaksanakan Program Kegiatan
2. Meningkatkan peran pemangku kepentingan, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan meningkatkan komitmen pemerintah.
3. Pengadaan pengusulan bantuan pengadaan dari dana APBD
4. Melakukan Koordinasi dengan berbagai Lintas Sektor yang terlibat agar dapat terbangun kerjasama yang sangat baik untuk melancarkan kegiatan Kampung Kb dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat mulai dari pembentukan sampai strategi untuk melakukan penyuluhan tersebut untuk memudahkan dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat.
5. Meningkatkan sosialisasi dan memperkuat koordinasi dengan masyarakat melalui tenaga Penyuluh KB.

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.6

### Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	87%	97,47%	0

Dari Tabel diatas Tingkat efisiensi sebesar 0%, Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, untuk indikator kinerja Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) dapat interpestasikan tidak efisien.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung penurunan Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate) adalah sebesar Rp.7.142.358.619. Untuk mencapai target perlu adanya

dana yang besar, Sumber dana untuk mendukung tercapainya program ini terdiri dari APBD, DAK Non Fisik yaitu BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dan DAK Fisik.

Dalam mencapai target indikator penurunan Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate) tahun 2024 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.7.327.675.800,- dengan 3 program 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Sedangkan pada tahun 2023 adanya dukungan anggaran sebesar Rp. 7.956.014.700 dengan 3 program 5 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.7.589.031.872. Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 7.327.675.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.142.358.619 Dengan persentase sebesar 97,47 %. Sementara Capaian Kinerja yang dapat diraih alah sebesar 87%. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja belum maksimal jika dibandingkan dengan dengan capaian keuangannya.

#### **7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan pada indikator Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate) adalah program Pengendalian Penduduk, program pembinaan keluarga berencana, dan program dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator angka kelahiran total pada Dinas pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2024, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dengan jumlah anggaran sebesar Rp Rp. 118.967.800,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 115.700.600,- atau 97,25%. dan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp Rp. 358.200.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 338.613.040,- atau 94,53%.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana terdiri atas 4 (Empat) kegiatan yaitu Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dengan jumlah anggaran sebesar 1.767.728.000 dengan realisasi 1.742.535.390 atau 98.57%, Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / Petugas lapangan KB (PKB atau PLKB) dengan jumlah anggaran sebesar 372.472.000 dengan realisasi 372.122.317 atau 99.91 %, Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB didaerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar 2.085.948.00 dengan realisasi 1.994.138.672 atau 95.60 % dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

dengan jumlah anggaran 587.050.000 dari jumlah tersebut direalisasikan sebesar 565.852.200 dengan presentase 96,39 %.

- c. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang terdiri atas 2 (Dua) kegiatan yaitu Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran kegiatan ini sebesar Rp.393.010.000 dan realisasinya sebesar Rp. 369.396.400 dengan persentase 93.99 % dan Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.644.300.000 dan realisasinya sebesar Rp.1.644.300.000 dengan persentase 99.98%.

Perbandingan efisiensi anggaran program tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada data dibawah ini:

1. Program pengendalian penduduk pada tahun 2023, dengan pagu anggaran Rp. 359.400.000 dan realisasinya sebesar Rp. 332.329.500 dengan persentase 92,48%. Sedangkan pada tahun 2024 anggaran program ini sebesar Rp. 477.167.800 dan realisasinya sebesar Rp. 454.313.640 dengan persentase 95,21%.
2. Program pembinaan keluarga berencana Tahun 2023, dengan pagu anggaran Rp. 5.484.984.901 dan realisasinya sebesar Rp. 5.158.799.472 dengan persentase 94,05 %. Sedangkan pada tahun 2024 anggaran program ini sebesar Rp. 4.813.198.000 dan realisasinya sebesar Rp. 4.674.648.579 dengan persentase 97,12 %.
3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera Tahun 2023, dengan pagu anggaran Rp. 2.085.559.900 dan realisasinya sebesar Rp. 2.077.218.750 dengan persentase 99.60 % Sedangkan pada tahun 2024 anggaran program ini sebesar Rp. 2.037.310.000 dan realisasinya sebesar Rp. 2.013.396.400 dengan persentase 98.83%.

Berbagai macam bentuk program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam upaya pencapaian Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate), yaitu meningkatkan Capaian tingkat pemakaian peserta KB aktif bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Padang Pariaman, adapun upaya bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi MKJP, Kegiatan Penyuluhan Keluarga Berencana, Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pemilihan Duta GenRe Kabupaten Padang Pariaman.

## Pelayanan KB MKJP



Keterangan : Pelayanan KB MKJP merupakan Pelayanan dalam mengatur kelahiran anak, jarak usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang yang meliputi IUD, Implan dan Kontap (Kontrasepsi mantap ) yaitu MOP dan MOW. Pelayanan KB MKJP salah satu kegiatan untuk dukungan terhadap program Bangga Kencana.

### Penyuluhan Keluarga Berencana



Keterangan : Penyuluhan Keluarga Berencana merupakan kegiatan penyampaian informasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat guna mewujudkan keluarga berkualitas. Sasaran utama pelaksanaan penyuluhan program keluarga  
*Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024*

berencana adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yakni suami istri di mana istri berusia 15-49 Tahun karena mempunyai kemungkinan untuk hamil dan memiliki anak.

### **Pembinaan Terhadap Kelompok Bina Keluarga, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)**

#### **Bina Keluarga Balita (BKB)**



#### **Bina Keluarga Remaja (BKR)**



#### **Bina Keluarga Lansia (BKL)**



Keterangan : Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pola asuh, kesehatan keluarga, Kesehatan reproduksi remaja, pendidikan, hubungan interpersonal, dan peran gender.

### Pemilihan Duta GenRe Kabupaten Padang Pariaman



Keterangan : Duta GenRe yang terpilih akan menjadi role model dan mensosialisasikan pemahaman mengenai kesehatan remaja, kependudukan, delapan substansi generasi berencana, pentingnya pendewasaan usia kawin, bahaya menikah usia muda, kriteria Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) terutama para remaja agar terhindar kehamilan tidak diinginkan seperti seks bebas, napza dan HIV/AIDS dan juga duta GenRe ini dapat memberikan

edukasi kepada Masyarakat tentang bahayanya pernikahan diusia dini untuk pengupayakan pencegahan tingginya angka pernikahan dini.

## SASARAN 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Ukuran keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja ditetapkan dengan indikator kinerja berupa: Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP DPPKB dari Inspektorat.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansi nya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMD.

Setiap tahunnya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mana juga diberikan penilaian dan peringkat atas Implementasi SAKIP yang diterapkan di masing-masing Perangkat Daerah.

### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024:

**Tabel 3.7**  
**Capaian Realisasi Indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat**

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024				Interpretasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>					

1	2	3	Tahun 2024				Interpretasi
			Satuan	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	A	A	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat terlihat Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 realisasinya mencapai 100% dengan nilai A dan interpretasi Sangat Berhasil. Nilai SAKIP yg berhasil diperoleh adalah A dengan nilai absolut 80,35. Hal ini membuktikan kesuksesan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Sasaran Strategis ke 4 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja dengan indikator sasaran Hasil penilaian evaluasi SAKIP.

## 2. Membandingkan Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

**Tabel 3.8**  
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2023	Tahun 2024			Interpretasi
					Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	A (80,35)	A	A	100	Sangat Berhasil

Realisasi kinerja pada indikator kinerja sasaran Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 adalah A dengan nilai absolut sebesar 80,35. Dan nilai pada tahun 2024 adalah A dengan nilai absolut 80,55 artinya mencapai target yang ditetapkan dan terjadi sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya.

3. Capaian Kinerja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun 2024 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

Tabel 3.9

Capaian Kinerja indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun 2024 dibandingkan dengan target perencanaan strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah				Realisasi Jangka Menengah			Realisasi 2024	Interprestasi
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>										
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	B	A	A	A	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, capaian indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat ini ini jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis, dapat mencapai target yang ditetapkan, artinya dapat diinterpretasikan sangat berhasil.

4. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan serta alternative solusi ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tahun 2024 Hasil Penilaian Sakip Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengimplementasikan SAKIP Perangkat Daerah.

Selain itu keberhasilan juga disebabkan adanya dukungan anggaran dari program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.10**  
**Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	100%	96,22%	3,78%

Dari Tabel diatas Tingkat efisiensi sebesar 3,78%, Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, untuk indikator kinerja Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dapat interpestatiskan efisien.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebesar Rp.3.349.830.227. Untuk mencapai target perlu adanya dana yang besar, Sumber dana untuk mendukung tercapainya program ini terdiri dari APBD Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam mencapai target indikator meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2024 adanya dukungan anggaran sebesar Rp. 3.481.461.411,- dengan 1 program 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan. Sedangkan pada tahun 2023 adanya dukungan anggaran sebesar Rp. 3.688.520.281 dengan 1 program 5 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 3.560.231.645. Total aggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 3.481.461.411,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.349.830.227 Dengan persentase sebesar 96,22 %. Sementara Capaian Kinerja yang dapat diraih adalah sebesar 100%. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal sama dengan capaian keuangannya.

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sebagai bentuk keberhasilan kegiatan dengan capaian indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun 2024, ada beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2024 di Dinas pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman program yang mendukung indikator ini adalah program penunjang urusan pemerintah daerah, program ini dianggarkan sebesar Rp. 3.481.461.411 dan terealisasi Rp. . 3.349.830.227 atau sebesar (96,22 %). Program ini terdiri dari 5 Kegiatan yang mendukung yaitu: Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Perbandingan efisiensi anggaran program tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada data dibawah ini:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah Tahun 2023, dengan pagu anggaran Rp. 3.688.520.281 dan realisasinya sebesar Rp. 3.560.231.645 dengan persentase 96,52 %. Sedangkan pada tahun 2024 anggaran program ini sebesar Rp. 3.481.461.411 dan realisasinya sebesar Rp. 3.349.830.227 dengan persentase 96,22 %

## B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, tidak hanya terbatas pada APBD tetapi juga sumber pendanaan lainnya.

Realisasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
1)	Tujuan : Birokrasi yang bersih dan akuntabel				
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>3.481.461.411</b>	<b>3.349.830.227</b>	<b>96,22%</b>	<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi</b>
1	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.050.000	36.626.534	93,79%	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen anggaran yang disiapkan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.340.000	14.876.605	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.710.000	21.749.929	95,77%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.240.026.411</b>	<b>3.121.937.380</b>	<b>96,36%</b>	<b>Jumlah laporan keuangan yang sesuai</b>

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
					dengan perundang undangan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.119.706.411	3.004.577.380	96,31%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>120.320.000</b>	117.360.000	97,54%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>59.859.000</b>	<b>58.242.634</b>	<b>97,30%</b>	<b>Persentase Penyediaan Dokumen Administasi Kantor Disiapkan</b>
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.439.000	7.417.285	99,71%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	860.000	847.000	98,49%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.560.000	49.978.349	96,93%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>121.526.000</b>	<b>112.067.029</b>	<b>92,22%</b>	<b>Persentase Penyediaan Dokumen Administasi Kantor Disiapkan</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.276.000	50.820.180	99,11%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.500.000	51.927.249	85,83%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.750.000	9.319.600	95,59%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>21.000.000</b>	<b>20.956.650</b>	<b>99,79%</b>	<b>Persentase Penyediaan Dokumen Administasi Kantor Disiapkan</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	<b>21.000.000</b>	<b>20.956.650</b>	<b>99,79%</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
	perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan				dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
2)	<b>Tujuan : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk</b>				
	<b>Sasaran : Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk</b>				
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>477.167.800</b>	<b>454.313.640</b>	<b>95,21%</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)</b>
<b>1</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>118.967.800</b>	<b>115.700.600</b>	<b>97,25%</b>	<b>Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk</b>
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	4.160.000	4.160.000	100%	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	6.750.000	6.631.200	98,24	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	6.000.000	5.674.400	94,57%	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	2.530.000	2.530.000	100	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
					kepada Pemangku Kepentingan
	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1.300.000	0	0	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	98.227.800	96.705.000	98,45%	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
<b>2</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>358.200.000</b>	<b>338.613.040</b>	<b>94,53%</b>	<b>persentase dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk yang disusun</b>
	Pencatatan dan Perkumpulan Data Keluarga	94.200.000	94.200.000	100%	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	264.000.000	244.413.040	92,58%	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
3)	<b>Tujuan : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk</b>				
	<b>Sasaran : Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk</b>				
<b>C</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>4.813.198.000</b>	<b>4.673.148.579</b>	<b>97,12%</b>	<b>Persentase Peserta KB Aktif ( CPR )</b>
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk</b>	<b>1.767.728.000</b>	<b>1.742.535.390</b>	<b>98,57</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pengendalian Penduduk</b>

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
	<b>dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>				<b>dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>
	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	210.528.000	198.720.000	94,39%	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12.000.000	11.886.000	99,05%	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	250.000.000	249.196.250	99,68%	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	287.000.000	283.358.400	98,73%	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	843.200.000	839.742.740	99,59%	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
	Pengendalian Program KKBPK	165.000.000	159.632.000	96,75%	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
2	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>372.472.000</b>	<b>370.622.317</b>	<b>99,91%</b>	<b>Jumlah tenaga Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdaya guna</b>
	Pembinaan IMP dan Program KKBP di lini lapangan oleh PKB/PLKB	45.472.000	43.946.617	99,94%	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	327.000.000	326.675.700	99,90%	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
3	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.085.948.000</b>	<b>1.994.138.672</b>	<b>95,60%</b>	<b>Jumlah Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan</b>
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.300.000	32.230.000	99,78%	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	605.529.000	605.500.450	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.099.624.000	1.012.760.922	92,10%	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	319.495.000	314.727.020	98,51%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
					Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	14.000.000	14.000.000	100%	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	10.000.000	9.940.000	99,40%	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria
4	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	587.050.000	565.852.200	<b>96,39%</b>	<b>Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi masyarakat) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK</b>
	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	16.000.000	15.980.000	99,88%	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	27.750.000	23.968.000	86,37%	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	258.281.251	240.885.451	93,26%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	285.018.749	285.018.749	100%	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB
4)	<b>Tujuan : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk</b>				
	<b>Sasaran : Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk</b>				

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
D	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	2.037.310.000	2.013.396.400	<b>98,83%</b>	<b>Persentase kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKA yang dibina</b>
1	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	393.010.000	369.396.400	<b>93,99%</b>	<b>Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi yang melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	65.000.000	64.640.000	99,45%	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	6.000.000	-	0	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000	291.276.000	97,09%	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	8.000.000	7.248.400	90,61%	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)peningka

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	7.010.000	-	0	tan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)  Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	7.000.000	6.232.000	89,03	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk
2	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	1.644.300.000	1.644.000.000	99,98%	Jumlah Kelompok tim pendamping keluarga yang berperan serta dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	783.000.000	782.700.000	99,96%	Jumlah kader Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	861.300.000	861.300.000	100%	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran,

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Uraian Pencapaian Kegiatan
	salin/kelahiran, Baduta/Balita)				baduta/balita) yang mendapat pendampingan
	<b>Jumlah</b>	<b>10.809.137.211</b>	<b>10.492.188.846</b>	<b>96%</b>	

### C. PENGHARGAAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 memperoleh penghargaan sebagai berikut :



Penghargaan Nasional dari BKKBN Pusat Juara 3 Dalam Apresiasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kategori Pagu Sedang Tahun 2024





Penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat Terbaik Kategori Pagu Sedang dalam Apresiasi Pengelola Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana





Penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat Terbaik 2 Tenaga Lini Lapangan Kategori PLKB Non PNS Tingkat Provinsi Sumatera Barat Atas Nama Monica Pertiwi,S.Ap



Penghargaan Ayah Bunda GenRe Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk Bapak Bupati dan Ibu Ketua TP PKK



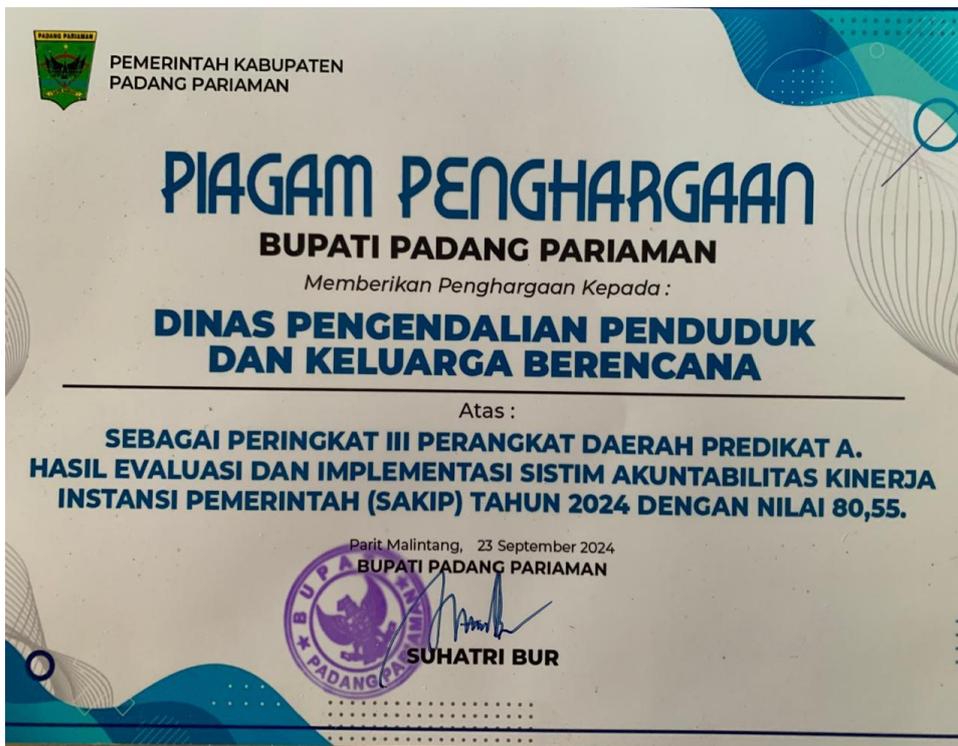
Penghargaan  
dari BKKBN  
Provinsi  
Sumatera Barat  
Juara 4 Duta  
GenRe Putra  
Sumatera Barat



Penghargaan  
dari BKKBN  
Provinsi  
Sumatera Barat  
Pembina Forum  
GenRe terbaik  
Atas Nama Nur  
Octavia  
Syamsul, MKM



Penghargaan dari Bupati Padang Pariaman Sebagai Peringkat III Perangkat Daerah Predikat A Hasil Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024



## **A. KESIMPULAN**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Realisasi indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) adalah 2,26 dari target 2,0, dengan capaian 87 % dan kategori Cukup Berhasil. Hal ini disebabkan karena adanya adanya dukungan anggaran BOKB , dukungan sumber daya manusia (petugas lapangan KB, kader KB ), ketersediaan alat-alat kontrasepsi di faskes, Meningkatnya jumlah PUS yang ber-KB dan adanya dukungan dari lintas sektoral seperti kegiatan GERAK IBI KB KES, TNI KB KES, PKK KB KES dan lokakarya mini di kampung KB, disamping itu juga ada permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya 100% yaitu Belum Maksimalnya Pemberian Advokasi dan KIE Kepada Masyarakat dan Masyarakat masih menganggap bahwa program tersebut bertentangan dengan agama, adat dan budaya, Keikutsertaan berbagai lintas sektor di wilayah Kampung KB masih Kurang dalam mendukung kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh KB, Pokja Kampung KB, dan Kader dan Program Kampung Kb masih belum menjadi Prioritas Utama di beberapa wilayah dan masih adanya Masyarakat yang belum memahami tentang program bangga kencana.
2. Capaian Indikator Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dapat mencapai Nilai A dengan nilai absolut 80,55 %, artinya dapat di interprestasikan kategori berhasil hal ini disebabkan dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengimplementasikan SAKIP Perangkat Daerah.

## **B. Langkah Kedepan**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

1. Meningkatkan Advokasi dan KIE tentang Keluarga Berencana kepada Masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan-pelatihan.
3. Meningkatkan peran kader dilapangan dalam pemberian informasi kepada masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi ke instansi terkait seperti BKKBN Perwakilan Sumatera Barat.
5. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman. mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, 27 Januari 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Dra.ELFI DELITA,M.Farm,Apt  
NIP. 196608021993032005